

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 0,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi triwulan I 2021 yang tercatat 0,84% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh turunnya tekanan harga di sebagian besar kelompok barang. Realisasi inflasi tersebut juga lebih rendah dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama (1,33% (yoy)). Selanjutnya, tekanan inflasi pada triwulan III 2021 diperkirakan meningkat, didorong oleh hari raya Idul Adha dan juga pola musiman yang memasuki musim tanam. Namun demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Bali akan terus mengawal pergerakan harga sehingga inflasi tetap terkendali. Inflasi Provinsi Bali pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 0,58% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (0,84%, yoy). Berdasarkan kelompok barang, melandainya inflasi terutama disebabkan oleh melandainya tekanan harga di sebagian besar kelompok, utamanya kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta lebih dalam deflasi kelompok transportasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

a) Penurunan tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama disebabkan oleh peningkatan pasokan sejalan dengan musim panen yang jatuh pada triwulan II 2021 b) Penurunan harga pada kelompok transportasi bersumber dari masih terbatasnya mobilitas masyarakat c) Kenaikan signifikan pada kelompok core inflation dan administered price. Secara umum, kenaikan harga barang sari sejalan dengan tingginya frekuensi kegiatan upacara keagamaan di bulan Juni 2021 yang dipercaya merupakan bulan baik oleh masyarakat Bali. Adapun peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan naiknya harga emas dunia. Di sisi administered price, naiknya tarif angkutan udara sejalan dengan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Provinsi Bali pada triwulan II 2021 adalah sebagai berikut: a) Dalam rangka pengendalian inflasi Provinsi Bali, TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota di Bali terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Di tengah tekanan Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga Triwulan II 2021, TPID melakukan berbagai inovasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. peningkatan permintaan, khususnya adanya program Work From Bali. Sementara itu, kelompok volatile food cenderung mengalami penurunan harga seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang merah. b) TPID kabupaten/kota melaksanakan high level meeting untuk merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi. High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten Tabanan dilakukan pada April 2021, dalam rangka antisipasi lonjakan permintaan dan harga komoditas pangan menghadapi hari besar keagamaan Galungan dan Kuningan. Selain itu, juga dilakukan HLM TPID Kota Denpasar pada Mei 2021 dalam rangka pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan HLM yang dilakukan, telah disepakati penjajakan kerjasama antar daerah (KAD) guna mendukung upaya pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. c) Upaya lainnya melalui komunikasi efektif dilakukan dengan perbaikan kualitas data dan memperkuat ekspektasi masyarakat terhadap pengendalian inflasi di daerah. Perbaikan kualitas data dilakukan dengan penguatan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, serta penggunaan kajian sebagai dasar perumusan kebijakan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Bali pada Triwulan II 2021 adalah sebagai berikut: a) Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan koordinasi dengan TPID Prov. Bali dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di seluruh daerah di Bali. b) Perlunya dibangun penataan kelembagaan yang baik, proses yang baik, dan memiliki sistem yang baik untuk bisa sustainable. Sehingga, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, tidak terjadi masalah karena sudah memiliki prioritas dan sistem yang bisa berjalan sendiri

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a) Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholders yang tergabung dalam TPID melakukan implementasi roadmap pengendalian inflasi di masing-masing Provinsi yang sudah ditandatangani ketua TPID Provinsi dalam hal ini Gubernur dan melakukan pelaporan evaluasi roadmap secara triwulanan. b) Melakukan pemenuhan pasokan untuk kebutuhan barang antar provinsi dan kelancaran transportasi distribusi barang yang berkelanjutan, khususnya melalui pelabuhan, dan melakukan komunikasi untuk menjaga ekspektasi masyarakat. c) Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar daerah dan sinergi antar TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.